

MANAJEMEN PENCEGAHAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

Alfandi Rafaniro

NPP. 31.0185

Asdaf Kota Jambi, Provinsi Jambi

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: alfandirafaniro@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Selamat Jalaludin, S.Pi, SH, MM

ABSTRACT

Problem statement/Background (GAP): Forest and land fires in East Tanjung Jabung Regency that continue to occur every year, are caused by high levels of drought in the dry season and the East Tanjung Jabung Regency area is dominated by flammable peatlands. Which causes a considerable negative impact on material and non-material losses, in the form of disruption of activities and public health. **Purpose:** The purpose of this study is to determine and describe the management carried out by BPBD in preventing forest and land fire disasters in Tanjung Jabung Timur Regency, Jambi Province, as well as inhibiting factors and how to overcome them in the implementation of disaster prevention management. **Method:** This research uses qualitative methods with a descriptive approach and inductive data analysis. In addition, the source of researcher data is people, places and documents with data collection techniques used, namely interviews, observations and documentation. The theory used is the theory of management according to George R. Terry. **Result:** The result of this study is that several indicators from the implementation of disaster prevention management of forest and land in East Tanjung Jabung Regency have been carried out. However, there are several shortcomings such as the lack of budget allocation for the prevention section, limited facilities to support the prevention process, as well as minimal public knowledge and awareness of the importance of disaster prevention and the East Tanjung Jabung Regency government which tends to prioritize preparedness in disaster emergency response rather than strengthening the prevention process against disasters before they occur. **Conclusion:** Disaster prevention management is already going quite well. BPBD has made various efforts such as socialization and counseling to the community but has not been maximally implemented by the community so that there is no emergence of community independence in dealing with forest and land diversity disasters.

Keywords: Forest and Land Fires, Prevention, BPBD, Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terus terjadi disetiap tahunnya, disebabkan karena tingkat kekeringan yang tinggi pada musim kemarau dan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di dominasi oleh lahan gambut yang mudah terbakar. Yang menyebabkan dampak negatif yang cukup besar terhadap kerugian materil maupun

non materil, berupa gangguan aktivitas dan kesehatan masyarakat. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen yang dilakukan BPBD dalam pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi serta faktor penghambat dan cara mengatasinya dalam pelaksanaan manajemen pencegahan bencana tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis data induktif. Selain itu, sumber data peneliti adalah orang, tempat dan dokumen dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori manajemen menurut George R. Terry. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini bahwa beberapa indikator dari pelaksanaan manajemen pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah terlaksana. Namun, terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya alokasi anggaran bagian pencegahan, keterbatasan sarana pendukung proses pencegahan, serta pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang minim terhadap pentingnya pencegahan bencana dan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang cenderung lebih mengutamakan kesiapsiagaan pada tanggap darurat bencana dari pada penguatan pada proses pencegahan terhadap bencana sebelum terjadi. **Kesimpulan:** Manajemen pencegahan bencana yang dilakukan sudah berjalan dengan cukup baik. BPBD telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tetapi belum maksimal diterapkan oleh masyarakat sehingga tidak munculnya kemandirian masyarakat dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan.

Kata Kunci: Kebakaran Hutan dan Lahan, Pencegahan, BPBD, Manajemen

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu kabupaten yang rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Kondisi wilayah hutan dan lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur banyak dijadikan lahan perkebunan dan pertanian. Daerah rawan kebakaran hutan dan lahan yaitu daerah yang memiliki hutan gambut yang cukup luas dan tingkat kekeringan yang tinggi di ikuti dengan kelembaban yang cukup rendah. Selain itu pembukaan lahan dengan cara membakar sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan perusahaan yang ada di wilayah tersebut demi suatu kepentingan, hal ini juga menjadi penyebab sebaran titik api yang lebih meluas menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan dalam jumlah besar. Kebakaran hutan dan lahan menurut Syaufina Latin dkk dalam buku Mari Belajar Kebakaran Hutan dan Lahan (2018) merupakan “Pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting atau cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon”.

Penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai urusan wajib pelayanan dasar dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan peraturan tersebut pemerintah membentuk badan yang bergerak dalam penanggulangan bencana yaitu: BNPB (tingkat nasional) sejalan dengan hal tersebut dibentuklah peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dimana untuk tingkat nasional tugas tanggung jawab dipegang oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPPD pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tanggung jawab ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan berbagai upaya pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat mengurangi kerugian dan meningkatkan ketahanan masyarakat khususnya yang berada pada daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikategorikan cukup signifikan. Dikarenakan besarnya luasan hutan berbanding lurus dengan tingginya peluang kebakaran hutan. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan ini juga menyebabkan meningkatnya potensi luas kerusakan lingkungan, termasuk pula didalam nya kerusakan keanekaragaman hayati dan gangguan aktivitas masyarakat yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Berikut ini merupakan grafik luas hutan dan lahan yang terbakar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2023 :



Garfik diatas menunjukkan bahwa setelah puncak kebakaran hutan dan lahan di tahun 2019, untuk 4 tahun berikutnya mengalami penurunan di tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 serta kenaikan luas hutan dan lahan kembali yaitu pada tahun 2023 sampai dengan saat ini. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan masih kurang efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Untuk itu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2017 yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

digunakan sebagai pedoman utama, yang juga menunjukkan perlunya BPBD, untuk meningkatkan perhatian terhadap dasar hukum dalam melaksanakan tugas.

1.3 Penelitian Terdahulu

Manfaat penelitian sebelumnya adalah sebagai kerangka kerja untuk penelitian. Selain itu dapat membantu dalam mengetahui persamaan dan perbedaan signifikan yang dibuat oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini didasari dari beberapa penelitian sebelumnya dalam rangka mengetahui manajemen pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Penelitian pertama oleh Dwi Harvikayan (2020) yang berjudul “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pengurangan Resiko Kebakaran Lahan di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang” hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi organisasi tergantung peran serta otoritas lembaga terkait seperti Satpol PP, Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Penelitian kedua Indah Pratiwi Anhar, dkk berjudul Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut terhadap Manusia dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Desa Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau) (2022), temuan penelitian ini adalah penyebab terjadinya karhutlah cenderung berasal dari ulah manusia yang diperburuk oleh kondisi alam, tingkat keparahan karhutlah ditentukan oleh kondisi vegetasi, hubungan positif antara faktor alam dan non-alam serta tinggi api saat kebakaran.

Penelitian ketiga Muhammad Riza dkk berjudul Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (2021), Temuan pada penelitian ini memperlihatkan bahwa tingkat kerawanan kebakaran Banjarbaru didominasi oleh tingkat kerentanan tinggi, hal tersebut dikarenakan memiliki tutupan lahan berupa pertanian, perkebunan, dan semak belukar dengan kerapatan vegetasi sedang-tinggi. Aktivitas manusia juga berperan dalam meningkatkan tingkat kerentanan kebakaran di wilayah tersebut.

Penelitian keempat dari Firda Rizky Ananda, dkk berjudul Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat (2022), Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat guna mencegah karhutlah khususnya sosialisasi tidak efektif karena faktor geografis dan kebiasaan masyarakat yang sulit dipantau.

Penelitian Kelima dari Tri Angraini dkk berjudul Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Musi Banyu Asin (2021), menemukan bahwa BPBD yang berperan sesuai dengan fungsi dan kewajibannya sebagai organisasi yang melakukan kajian risiko kawasan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin

Penelitian Keenam dari Siti Hazar Sitorus dan Rahmad Hidayat (2020) “Strategi Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau” menjelaskan bahwa penanggulangan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan strategi yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat di sungai pakning dimulai

dengan memberdayakan kelompok masyarakat peduli api (MPA) dan berkerja sama dengan PT. Pertamina RU II

Penelitian Ketujuh dari Rizki Sahputra, Sigit Sutikno dan Ari Sandhyavitri (2017). “Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Gambut Berdasarkan Metode Network Analysis Berbasis GIS” menjelaskan bahwa mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan menyesuaikan dengan dibutuhkannya penambahan beberapa posko pemadam kebakaran di lokasi tertentu untuk memperpendek jarak tempuh dan waktu tempuh ke lokasi kebakaran.

Penelitian kedelapan dari Kushartati Budiningsih (2017) “Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan” menjelaskan bahwa kinerja yang dicapai sebagai konsekuensi tidak memenuhi tujuan pemadaman dengan kemampuan terbaiknya. Otoritas, komunikasi, tingkat kontrol, dan kepemimpinan adalah beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Penelitian kesembilan dari Rosalina Kumalawati, Nasruddin dan Elisabeth (2019) “Strategi Penanganan Hotspot Untuk Mencegah Kebakaran Di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan”. Menjelaskan bahwa Terdapat 34 strategi yang berhasil di analisa dalam penanganan hotspot namun dari 34 strategi tersebut tidak semua dapat berjalan secara efektif dikarenakan beberapa faktor penghambat seperti kurangnya anggaran dan lain lain

Penelitian Kesepuluh oleh Rustan dan Linda Handayani (2020) “Analisis Distribusi Suhu Maksimum Dan Kelembaban Rata-Rata Untuk Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi” menjelaskan bahwa terdapat korelasi positif antara suhu tertinggi dengan jumlah hotspot, sedangkan korelasi negatif antara rata-rata kelembaban dengan jumlah hotspot Kebakaran hutan dan lahan mungkin terjadi di wilayah yang suhunya berkisar antara 33,5 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius dan kelembaban relatif antara 62% hingga 72%

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Ada beberapa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya sebagaimana yang dirincikan pada bab tinjauan pustaka, yaitu penelitian ini membahas bagaimana manajemen yang dilakukan BPBD dalam pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan dan upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada. Perbedaan juga terletak pada penggunaan teori yang digunakan, fokus pencegahan bencana karhutla, metode yang digunakan dalam penelitian, serta lokasi yang menjadi fokus penelitian

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi jambi dan upaya BPBD dalam mengatasi hambatan yang menghambat kinerja BPBD dalam menghadapi bencana karhutla.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis data induktif melalui akses data yang diperoleh dari wawancara, observasi

dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengatui kondisi sebenarnya yang terjadi saat penelitian berlangsung yang kemudian dideskripsikan melalui kata – kata dan bahasa sesuai dengan metode ilmiah. Simangunsong (2017:190) dalam bukunya metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami. Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian partisipatif, dimana desain penelitian bersifat fleksibel dan dapat diubah menyesuaikan dengan rencana yang dibuat oleh fenomena yang ada di lokasi penelitian yang sebenarnya. Penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri yang akan dilakukan dengan memakai metode deskriptif. Simangunsong (2017:192) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meyakini bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna. Oleh karena itu, harus diakui bahwa makna yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan ungkapan pertanyaan yang disusun menjadi "topik penelitian yang subjektif dan multipel". Instrumen penelitian merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan peneliti untuk membantu dalam proses pengumpulan data agar proses tersebut bisa dipermudah.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap 7 orang informan yang telah ditetapkan. Selain itu dalam pengumpulan data dokumentasi peneliti menggunakan peraturan perundang – undangan, surat edaran, arsip, serta gambar atau foto yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan bencana karhutla. Peneliti juga melakukan observasi terhadap kondisi beberapa wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan. Adapun beberapa cara analisis data dengan menggunakan 4 tahapan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, peneliti mendeskripsikan manajemen pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan menggunakan Teori Manajemen dari George. R Terry (2009) dengan dimensi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan.

3.1 Manajemen Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3.1.1 Perencanaan

Perencanaan dalam manajemen pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan proses penting untuk mengidentifikasi risiko potensial yang disebabkan oleh bencana kebakaran hutan dan lahan, dengan mengembangkan strategi pencegahan yang efektif serta merencanakan respons yang cepat dan terkoordinasi jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Strategi untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan merujuk pada pernyataan yang merinci

bagaimana tujuan dan sasaran akan diwujudkan, yang kemudian dijabarkan dalam rangkaian kebijakan. Strategi merupakan serangkaian langkah yang mencakup program-program sebagai prioritas utama pembangunan daerah atau perangkat daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah

Dalam hal perencanaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan analisis sesuai prosedur dengan baik mulai dari pemetaan daerah berdasarkan data, mengidentifikasi resiko, serta perumusan strategi dan rencana aksi. Rencana kerja pun telah disusun dengan baik, Berdasarkan pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas maka dapat dianalisis kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Perencanaan tujuan ini didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap risiko serta kebutuhan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran hutan dan lahan. Dengan mengikuti perencanaan tujuan yang matang dan terarah, BPBD berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh bagi masyarakat serta melindungi keberagaman hayati yang berharga dalam rangka menjaga keberlanjutan alam.

3.1.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam manajemen pencegahan bencana merupakan aspek penting dalam upaya pencegahan, persiapan, respons, dan pemulihan terhadap bencana alam atau insiden darurat lainnya. Proses ini menjadi tanggung jawab BPBD atas manajemen bencana tingkat lokal dan regional, sedangkan pada tingkat nasional menjadi tanggung jawab BNPB. Tidak hanya lembaga tersebut akan tetapi dalam pelaksanaannya melibatkan pengaturan dan koordinasi berbagai entitas, termasuk badan pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi relawan, dan sektor swasta, untuk memastikan respons yang efektif dan terkoordinasi.

Susunan organisasi yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik, mengenai pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan secara efektif melalui upaya bersama dari berbagai pihak yang terlibat. Komunikasi yang baik, dan kerjasama yang erat menjadi kunci dalam meminimalkan risiko kebakaran serta melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampaknya. Dalam pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan, susunan organisasi yang efektif sangat penting untuk memastikan koordinasi yang baik, alokasi sumber daya yang tepat, dan respons yang cepat dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Dalam hal pengorganisasian manajemen pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan, susunan organisasi dalam tahap ini cukup terstruktur dan tertata dengan baik. Karena untuk menangani bencana yang berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat, maka dibutuhkan pula peran aktif serta kerja sama dari berbagai kalangan dan organisasi yang berwenang.

3.1.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan manajemen pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, adalah suatu proses yang terstruktur dan terorganisir untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang

dirancang untuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta meminimalkan dampaknya di wilayah tersebut. Langkah-langkah konkret dimulai dari pengumpulan data tentang faktor-faktor risiko yang spesifik untuk daerah tersebut, seperti topografi, vegetasi, dan pola cuaca. Berdasarkan analisis risiko yang cermat, strategi pencegahan yang sesuai dengan kondisi lokal dapat dirumuskan

Langkah-langkah konkret seperti sosialisasi kepada masyarakat, penegakan hukum terhadap pembakaran ilegal, pemantauan cuaca dan lingkungan, serta pemeliharaan lahan penting untuk terus dilakukan karena telah memberikan dampak positif dalam mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Meskipun demikian, BPBD tetap melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap strategi pencegahan yang ada untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang, seperti perubahan iklim dan aktivitas manusia. Kerjasama antara BPBD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan ini, dan hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

3.1.4 Pengendalian

Hasil dari pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi aspek kritis dalam manajemen bencana yang efektif. Berdasarkan data dan wawancara dengan pelaksana kebijakan di kantor BPBD setempat, langkah-langkah pengendalian dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi strategi yang telah diterapkan serta untuk mengidentifikasi area perbaikan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi menghadapi risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dari hasil upaya dan evaluasi yang dilakukan oleh BPBD Tanjung Jabung Timur, jelas bahwa ada kemajuan yang signifikan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan dari program-program yang telah ada. Melalui implementasi solusi yang telah diusulkan, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam pengendalian dan pencapaian tujuan organisasi dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan di masa depan.

3.2 Faktor penghambat serta upaya mengatasinya dalam pelaksanaan manajemen pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3.2.1 Kurangnya Alokasi Anggaran untuk Manajemen Pencegahan

Alokasi anggaran pencegahan kebakaran hutan dan lahan lebih dominan pada tanggap darurat kebakaran hutan, padahal sesuai intruksi Bapak Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020 untuk memaksimalkan pencegahan dan mitigasi bencana dibandingkan dengan penanganan bencana, karena mencegah lebih baik dibandingkan mengobati, sehingga diharapkan terjadinya perencanaan ulang terkait dana pencegahan bencana.

Untuk kedepannya diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur mampu mengajukan menambahkan anggaran pada bagian manajemen pencegahan dan mitigasi sehingga upaya pencegahan dapat dimaksimalkan dan memiliki hasil yang cukup signifikan..

3.2.2 Keterbatasan Kelengkapan Sarana

Kelengkapan sarana penunjang dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu faktor pendukung yang sangat berpengaruh, dengan lengkapnya sarana tentu akan membantu proses penanganan bencana kebakaran dan hutan yang lebih efektif, dikarenakan bencana kebakaran hutan ini harus diatasi dalam waktu sesingkat-singkatnya, jika tidak maka dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar dan dapat membawa bencana lainnya seperti kabut asap.

Kesiapan sarana alat pemadam api menjadi pemeran utama dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, kesiapan alat pemadam mulai dari selang, mesin hingga alat pendukung lainnya tentu sangat dibutuhkan, kesiapan yang dimaksud adalah apakah alat-alat tersebut masih layak digunakan , apakah jumlah yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan, dan lain sebagainya

3.2.3 Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat melalui proses sosialisasi harusnya menjadi tugas utama dalam manajemen pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berbagai upaya telah dilakukan mulai dari sosialisasi langsung kepada masyarakat setempat, membuat kelompok Masyarakat Desa Tangguh Bencana dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan memberikan peralatan seperti mesin dan selang agar masyarakat dapat melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin.

Kegiatan sosialisasi merupakan salah satu program yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pasal 14 yang menerangkan bahwa seluruh kegiatan sosialisasi yang dilakukan bukan hanya sekedar penyuluhan atau pelatihan akan tetapi juga melakukan kampanye melalui media elektronik dan cetak, memasang palang himbauan untuk masyarakat larangan untuk membakar hutan dan lahan, dan melakukan simulasi pada saat mensosialisasikan penanganan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat. Untuk itu penting bagi BPBD mengusahakan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam rapat penentuan kegiatan dan selalu berkoordinasi dengan masyarakat jika di daerahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan agar cepat menghubungi BPBD agar kebakaran hutan dan lahan cepat untuk diatasi.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan manajemen pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami beberapa kendala, yaitu : kurangnya alokasi anggaran pada bagian pencegahan atau pra bencana, keterbatasan sarana yang menunjang

pemadaman dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membantu pemadaman jika ditemukan titik api disekitar. Sehingga untuk mengatasi hal ini dibutuhkan upaya prioritas yang dapat dilakukan alokasi pada pencegahan dan mitigasi, melengkapi sarana penting dan selalu mengikut sertakan masyarakat dalam upaya pencegahan bencana. Temuan ini serupa dengan permasalahan pada penelitian Muhammad Riza, dkk (2021) tentang bencana kebakaran hutan dan lahan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan peneliti mengenai manajemen pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dapat peneliti simpulkan bahwa Manajemen Pencegahan bencana Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur semuanya sudah terlaksana namun belum maksimal. Hal ini berdasarkan temuan bahwa Sosialisasi, patroli dan Pelatihan tim serta Penyiapan Sarana yang terlaksana namun belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator dari tiap kegiatan yang digunakan yang peneliti jabarkan di hasil dan pembahasan. Adanya beberapa kendala dalam manajemen pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, seperti: kurangnya alokasi anggaran pada bagian pencegahan atau pra bencana, keterbatasan sarana yang menunjang pemadaman dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membantu pemadaman jika ditemukan titik api disekitar.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini tentunya peneliti memiliki keterbatasan tertentu seperti keterbatasan waktu, kemampuan dan biaya penelitian. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Upaya BPBD dalam manajemen pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Syaufina, L. (2008). *Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia: perilaku api, penyebab, dan dampak kebakaran*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Terry, G.R. (2009). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Simangunsong, Fernandes, 2017. *Metodelogi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Simangunsong, Fernandes. 2021. *Menata Ulang Organisasi Perangkat Daerah*. Bandung: Alfabeta

Nurjanah, R.Sugiharto, Dede Kuswanda, Siswanto BP, Adikoesoemo, (2012).
Manajemen Bencana. Bandung: Alfa Beta

Jurnal

Anggraini, T., & Agustian, D. (2021). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutlah) Di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 41–46. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1510>

Anhar, I. P., Rina Mardiana, & Rai Sita. (2022). Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut terhadap Manusia dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Desa Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau). *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 6(1), 75–85. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v6i1.967>

Riza, M., Arisanty, D., & Adyatma, S. (2021). Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. *Jambura Geoscience Review*, 3(2), 57–64. <https://doi.org/10.34312/jgeosrev.v3i2.5648>

Ananda, F. R., Purnomo, E. P., Fathani, A. T., & Salsabila, L. (2022). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(2), 173–181. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.34698>

Sitorus, Siti Hazar, dan Rahmat Hidayat. “Strategi mitigasi kebakaran hutan dan lahan melalui pemberdayaan masyarakat di sungai pakning kabupaten bengkalis provinsi riau.” *International Conference Communication and Sosial Sciences (ICCOMSOS)* 1, no. 1 (2020): 23–29. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ICCOMSOS/article/view/8283>

Peraturan Undang - Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008. tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur